

**Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum**  
Yasardin, Hakim Agung Humoris  
dan Menyenangkan Bagi Keluarga

**Syamsul Maarif., S.H., LL.M., Ph.D**  
Dari Madrasah Hingga Mahkamah

# MAJALAH PERADILAN AGAMA

EDISI 13 | JUNI 2018

[www.badilag.mahkamahagung.go.id](http://www.badilag.mahkamahagung.go.id)



## UNJUK PRESTASI DENGAN AKREDITASI

ISSN 2355-2476



9 772355 247003



# *Selamat dan Sukses*

*ATAS PELANTIKAN YANG MULIA*



*DR. H. SUNARTO, S.H., M.HUM.*

*SEBAGAI WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG RI  
BIDANG NON YUDISIAL*



*KELUARGA BESAR  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA*



2 Salam Redaksi

3 Editorial

4 Suara Pembaca

5 Laporan Utama

Ada garis penghubung antara tujuan reformasi birokrasi, pembaruan peradilan dan akreditasi pengadilan. MA jadi pencetak rekor.t.

30 Fenomenal

Anak yang lahir dari perkawinan yang hanya sah secara agama (tidak tercatat di kantor urusan agama) dan ada pengakuan dari orang tuanya dapat ditetapkan sebagai anak sah dari kedua orang tua tersebut.

37 Peradilan Mancanegara

44 Opini

Pada dasarnya dorongan penerapan ISO di empat lingkungan peradilan dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pengadilan sehingga pelayanan publik yang diberikan dapat lebih optimal.

50 Sosok

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D

Dari Madrasah Hingga Mahkamah

56 Tokoh Kita

DR. H. VASARDIN, S.H., M.HUM

Kaderisasi itu harus dilakukan secara terstruktur. Sejak menjadi calon hakim, ketika mereka mengikuti pendidikan dan pelatihan selama dua tahun, kita harus sudah bisa mengamati mana yang layak menjadi kader yang harus dibina terus.

64 Anotasi Putusan

74 Postur

80 Pengadilan Inspiratif

90 Kilas Peristiwa

93 Aktual

96 Kisah Nyata

101 Jinayah

Sejak tahun 2010 Indonesia mengalami darurat kejahatan seksual. Hingga saat ini jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Para pelakunya masih berusia anak-anak hingga tahun 2017 lalu, puncak kejahatan seksual terus meningkat termasuk di Provinsi Aceh

105 Resensi

108 Pojok Dirjen



# Komitmen Menyongsong Akreditasi

Majalah Peradilan Agama kembali menyapa Anda. Dalam tema yang berbeda tentunya. Kali ini majalah hadir di tengah gelora program akreditasi yang begitu masif di Peradilan Agama. Sejumlah Pengadilan Agama (PA) mengikuti Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) Tahun 2018. Sebagai bahan bacaan tambahan, redaksi sengaja menyuguhkan tema ini agar khalayak bisa memiliki gambaran utuh betapa liku juang sejumlah PA dalam menyongsong akreditasi begitu mengharukan.

Di tengah rentang waktu yang mepet mempersiapkan dokumen, penyesuaian buku standar yang terbit di menit terakhir sebelum penilaian eksternal, hingga anggaran yang tipis, membuat kerja pembaruan ini semakin terlihat punya nilai juang. Ini bukan soal prestise. Sebab, mengejar gengsi tanpa substansi hanyalah pepesan kosong. SAPM adalah upaya sistematis, kontinyu, dan konsisten sehingga produk pengadilan tidak cacat sehingga bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Jika sebagian pihak beranggapan bahwa program akreditasi hanya akan melahirkan korupsi kebijakan, tentu harus didukung oleh data yang kuat supaya asumsi tersebut tidak terkesan menggeneralisasi. Sebab, dalam banyak pengalaman, sejumlah PA yang sudah mengimplementasikan SAPM, manajemen kepemimpinan semakin kuat dan terarah, strategi dalam memanfaatkan peluang yang dimiliki semakin baik, administrasi lebih tertib, tertata dan terdokumentasi, serta yang lebih penting Pengadilan Agama mampu mengidentifikasi pihak berkepentingan dan mengolahnya dalam identifikasi kebutuhan dan harapan *stakeholders*. Muaranya masyarakat pencari keadilan yang diuntungkan oleh pelayanan yang prima dan profesional.

Penggarapan Majalah Peradilan Agama Edisi ke-13 bertempat di Kota Gudeg, Yogyakarta. Di sana para redaktur majalah berkumpul menuangkan pikiran, mengumpulkan data, mewawancarai beberapa responden, dan mengolahnya dalam sebuah sajian artikel semi ilmiah. Tentu diskusinya lumayan gayeng mengingat program akreditasi ini termasuk “barang” baru. Ditambah standar yang digunakan mengalami banyak pembaruan dibandingkan tahun sebelumnya.

Majalah Peradilan Agama kali ini tampaknya terbit dalam suasana Idul Fitri 1439 H. Luapan kegembiraan membuncih di Hari Kemenangan itu setelah sebulan penuh ditempa puasa Ramadan menaklukkan keegoan diri. Seperti kata Nabi Muhammad kepada pejuang Islam seusai Perang Badar, bahwa umat Islam baru saja menyudahi perang kecil dan akan memasuki perang yang lebih besar, yakni perang melawan hawa nafsu.

Ucapan Nabi Agung tersebut tampaknya sangat relevan dalam konteks implementasi SAPM di Peradilan Agama. Segenap warga Peradilan Agama baru saja menyudahi “perang” habis-habisan menyempurnakan sejumlah dokumen sesuai cekcklist, mengumpulkan eviden, melengkapi sarana dan prasarana, yang kesemuanya menguras energi dan waktu. Tapi, semua itu hanyalah awal dari peperangan. Karena peperangan yang sesungguhnya ialah menjaga komitmen bersama agar SAPM ke depan tetap diimplementasikan secara konsisten dan produk yang dihasilkan sesuai standar. Ya, komitmen dari mulai unsur top manajemen hingga lapisan bawah memang sangat menentukan keberhasilan SAPM.

Komitmen menurut beberapa literatur adalah keterikatan, perjanjian, atau keterlibatan untuk melakukan sesuatu. Bukti adanya komitmen ialah tindakan nyata untuk melakukan apa yang diperlukan berkaitan dengan apa yang dijanjikan serta tidak mengambil tindakan yang merusak apa yang diperjanjikan. Dalam sebuah institusi, komitmen organisasional mengandaikan keberpihakan dan loyalitas karyawan terhadap organisasi dan tujuan organisasi. Marthin dan Nicholls dalam Armstrong (1991), misalnya, menyatakan bahwa untuk membentuk komitmen dalam organisasi hendaknya diawali dengan rasa memiliki terhadap organisasi, menciptakan semangat dalam bekerja, dan keyakinan dalam manajemen. Begitu pentingnya komitmen bersama, sehingga keberadaannya sangat menentukan tercapai atau tidaknya tujuan organisasi. Akhirulkalam, semoga usai memperoleh status akreditasi, Pengadilan Agama tetap komitmen menjaganya.



### DEWAN PAKAR:

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.M., M.H.  
Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.  
Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.  
Dr. H. Mukti Arto, S.H., M.Hum.  
Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.  
Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum

### PENASEHAT:

Drs. H. Abdul Manaf, M.H.

### PENANGGUNG JAWAB:

Dr. H. Hasbi Hasan, M.H.

### REDAKTUR SENIOR:

Drs. H. Sulaeman Abdullah, S.H., M.H.  
Drs. H. Abd. Ghoni, S.H., M.H.  
Arief Gunawansyah, S.H., M.H.  
Bambang Subroto, S.H., M.H.  
Sutarno, S.Ip., M.M.

### REDAKTUR PELAKSANA:

Rahmat Arijaya, S.Ag., M.Ag.

### EDITOR:

Achmad Cholil, S.Ag., S.H., LL.M.  
Mahrus Abdurrahim, Lc., M.H.  
Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag.  
Hermansyah, S.H.I.

### DEWAN REDAKSI:

Dr. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.S.I.  
Dr. Sugiri Permana, M.H.  
Achmad Fauzi, S.H.I.  
Ade Firman Fathony, S.H.I., M.S.I.  
Alimuddin, S.H.I., M.H.  
Edi Hudia, Lc., M.H.  
M. Isna Wahyudi, S.H.I. M.SI.  
Mohammad M. Noor, S.Ag.  
Saiful, S.Ag., M.H

### SEKRETARIAT:

Hirpan Hilmi, S.T.  
H. Dedy Juniawan, S.H.  
Zaenal Abidin, S.E.  
Adnan Qori Widanu, S.H.

### DESAIN GRAFIS/FOTOGRAFER:

Ridwan Anwar, S.E.  
Iwan Kartiwan, S.H.  
Abdul Rahman, S.H.

### SIRKULASI/DISTRIBUSI :

Bagian Umum Sekretariat  
Ditjen Badilag MA RI.

### DITERBITKAN OLEH:

Direktorat Jenderal Badan Peradilan  
Agama Mahkamah Agung RI

ISSN 2355-2476

### ALAMAT REDAKSI:

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lt.6  
Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 bypass  
Cempaka Putih, Jakarta Pusat  
Telp. (021) 290 79277; Fax. (021) 290 79211  
Email: majalah.badilag@gmail.com  
www.badilag.mahkamahagung.go.id

# Akreditasi, Apresiasi dan Aspirasi

*A person who feels appreciated  
will always do more  
than what is expected.*

Kata-kata dari “unknown author” itu cocok betul dilekatkan pada ikhtiar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menganugerahkan penghargaan kepada seluruh aparaturnya peradilan agama yang gigih melawan keterbatasan-keterbatasannya hingga berhasil meraih akreditasi dalam program Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu atau SAPM.

Ya, seseorang yang merasa diapresiasi akan selalu berupaya melakukan lebih dari yang diharapkan.

Setelah berstatus terakreditasi, yang berarti “terakui,” ada keyakinan aparaturnya peradilan agama akan berlomba-lomba untuk semakin membuktikan bahwa status itu tak sekadar keren di atas kertas. Status itu dipercaya bakal melahirkan hasrat menggebu-gebu untuk menunjukkan kinerja dan pelayanan kelas satu.

Buat pihak-pihak yang berkepentingan (*interested parties*) dengan eksisnya peradilan agama, khususnya para pencari keadilan, akreditasi pengadilan diharapkan membawa keuntungan nyata. Memang benar, dari segi layanan substantif, pengadilan yang telah terakreditasi bukan berarti memberikan putusan yang lebih adil dibandingkan pengadilan yang belum terakreditasi, karena hukum materiil maupun hukum formil yang dipakai seluruh pengadilan itu sama. Perbedaan akan terasa dari segi layanan administratif.

Pengadilan yang telah terakreditasi mestinya lebih baik ketimbang pengadilan yang belum terakreditasi dalam hal prosedur, persyaratan, waktu, biaya, kompetensi petugas, keramahan petugas, kualitas produk, sarana-prasarana dan mekanisme pengaduan.

Soalnya, apakah apresiasi yang diberikan MA—khususnya Ditjen Badilag—selamaini sudah cukup memadai? Apakah selembarnya sertifikat itu otomatis dapat mengontrol harkat dan martabat? Apakah ucapan selamat dan jabat tangan dengan Ketua Mahkamah Agung itu sudah cukup sepadan dengan jerih-payah berbulan-bulan?

Aparaturnya peradilan agama bercabang dua. Ada yang cukup legawa. Ada yang berharap lebih darinya.

Mereka yang berharap lebih itupun terpolarisasi jadi dua. Yang satu menghendaki supaya diberi *reward* yang individual dan konkret. Mutasi dan promosi jabatan, misalnya. Namun ada *counter attack* terhadapnya. Jika penghargaan itu diwujudkan dalam bentuk mutasi dan promosi jabatan, dikuatirkan yang mencicipinya hanya orang-orang tertentu: Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan/atau Sekretaris pengadilan. Para pegawai di level menengah dan rendah tetap akan jadi tukang sorak.

Kelompok lainnya menginginkan agar *reward* itu konkret, tapi tidak individual. Contohnya memperoleh peningkatan anggaran dan sarana-prasarana pengadilan dari MA. Tetapi, yang inipun kena serangan balik: Jangankan mengalami peningkatan anggaran, mampu mempertahankan jumlah anggaran yang ada saja sudah bersyukur. Ini karena dalam beberapa tahun ini ada trend anggaran MA berangsur-angsur turun.

Respons terhadap dua aspirasi itu sesungguhnya dapat dijalankan simultan. MA harus mulai merumuskan model *reward* yang tepat dari segi peningkatan karir aparaturnya peradilan untuk seluruh level. Toh, siapa saja yang berjuang dan berkontribusi dalam keberhasilan meraih akreditasi itu dapat mudah terlacak. Di lingkungan peradilan agama, misalnya, tiap-tiap satker itu punya Tim SAPM yang dikukuhkan dalam keputusan ketua pengadilan. Siapa saja dan apa tugas dan tanggungjawabnya terjabarkan di situ. Kalau itu tidak cukup, menggali informasi lebih lanjut dapat dilakukan untuk merekam jejak siapa saja yang benar-benar jadi “pejuang SAPM,” baik di muka maupun di belakang gemerlapnya layar.

Mengenai peningkatan anggaran dan sarana-prasarana pengadilan, itu memang bukan perkara gampang. Tetapi, inipun bukan hal yang impossible. Kesediaan Bappenas dan Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran untuk akreditasi adalah sinyal bahwa pihak eksekutif, juga legislatif, mendukung program prioritas ini.

Ke depan, idealnya dukungan itu tak berhenti pada pengalokasian anggaran kepada MA untuk menyelenggarakan akreditasi pengadilan. Kita layak dan sah-sah saja berharap lebih. Bagi MA, banyaknya pengadilan pada empat lingkungan peradilan yang meraih akreditasi seharusnya dijadikan *a great bargaining tool for justice* atau alat tawar-menawar untuk menggapai keadilan dalam sistem penganggaran di negeri ini.

Seluruh pengadilan yang telah terakreditasi itu mestinya diberi bonus berupa tambahan anggaran untuk belanja barang dan modal, supaya tatakelola, kinerja dan pelayanannya berada pada *peak performance*.

Bukankah sangat tidak adil, jika pengadilan-pengadilan telah berperang melawan segala macam kekurangannya untuk keperluan akreditasi, dan setelah berhasil terakreditasi ternyata tidak menuai penghargaan yang lebih bernilai? []



## Perlu Dibuat Rubrik Kejadian Unik



Sekalipun bertugas di Pengadilan Perbatasan tidak menyurutkan minat kami mengikuti perkembangan. Salah satunya dengan kehadiran Majalah Peradilan Agama ini sangat memberi manfaat, menambah ilmu sekaligus menginspirasi, ajang silaturahmi saling mengenal antara sesama warga peradilan terkhusus Peradilan Agama.

Guna menambah warna dalam Majalah ini, sekedar usul saran dimuat berita atau kejadian unik, menarik atau bahkan menantang tentang pelaksanaan tugas di Pengadilan-Pengadilan Perbatasan yang tentunya memiliki tantangan tersendiri dibanding Pengadilan-Pengadilan yang wilayahnya lebih berkembang dan aksesnya lebih mudah terjangkau.

[Syamsul Bahri, S.HI - Hakim PA Kefamenanu, NTT].

Redaksi: Terima kasih atas apresiasinya. Nanti akan kami sampaikan ke pimpinan terkait rubrik yang Bapak usulkan.

## Perlu Dibuat Rubrik Dalil-dalil dari Kitab Klasik



Apresiasi yang tinggi untuk Tim Redaksi yang telah menerbitkan Majalah Peradilan Agama dengan isi yang berkualitas dan menarik, terutama rubrik fenomenal serta pengadilan inspiratif. Sekedar masukan, karena ini dunia pengadilan agama mohon ditambahkan rubrik tentang dalil-dalil dari kitab klasik yang berkaitan dengan perkara yang ditangani oleh pengadilan agama.

[Fahmi Hamzah.R, SHI - PA.Manna]

Redaksi: Terima kasih atas sarannya. Nanti kami sampaikan kepada pimpinan.

## Perlu Rubrik Khusus Istilah Hukum



Saya memberikan apresiasi atas kerja keras Tim Redaksi Majalah Peradilan Agama. Saya mengusulkan agar ada penambahan rubrik Kamus Bahasa Hukum. Pada rubrik itu, bisa dijelaskan tentang istilah-istilah hukum perdata, hukum pidana/jinayah dan juga istilah terkait dengan ekonomi syariah.

Sebuah harapan besar, Majalah Peradilan Agama ini dapat terus eksis karena kehadirannya sangat membantu dalam menambah khazanah keilmuan khususnya bagi warga Mahkamah Syariah/Peradilan Agama.

[Siti Salwa, S.H.I - Hakim Mahkamah Syariah Sigli]

Redaksi: Terima kasih atas apresiasinya. Saran Ibu akan kami sampaikan ke pimpinan.

## Perlu Dibuat Rubrik Suka-Duka Pegawai



Sebagai Hakim pada lingkungan peradilan agama, sudah seharusnya menjadi pembaca tetap majalah peradilan agama. Majalah peradilan agama diharapkan menjadi media penghubung dan pusat informasi pendukung untuk menunjang pekerjaan di pengadilan agama.

Kedepan, diharapkan majalah ini mampu secara rutin menerbitkan artikel-artikel, dan menambah konten lain seperti berbagi pengalaman dari hakim wilayah lain, info penting tentang aturan baru dan kabar suka duka dari pegawai pengadilan agama. Semoga majalah peradilan agama menjadi bacaan rutin bagi seluruh pegawai di lingkungan peradilan agama dan mampu menelurkan penulis-penulis handal.

[Nidaul Husni, S.HI, M.H - Hakim pada PA Rengat].

Redaksi: Terima kasih atas sarannya. Nanti kami sampaikan kepada pimpinan.